

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gender merujuk pada konstruksi sosial tentang peran, perilaku, aktivitas dan atribut-atribut yang dianggap pantas untuk laki-laki dan perempuan. Gender juga memuat harapan masyarakat akan nilai, apa yang dianggap baik dan buruk bagi perempuan dan laki-laki, serta harapan akan peran yang dapat dimainkan perempuan dan laki-laki di masyarakat. Berbeda dengan sex, walaupun sering dianggap sama, tetapi jelas berbeda. Sex lebih merujuk pada perbedaan biologis, kromosom, hormone dan organ antara laki-laki dan perempuan. Misalnya, laki-laki mempunyai testis, perempuan mempunyai payudara yang umumnya membesar dan dapat digunakan untuk menyusui, sedangkan laki-laki tidak. Dari kedua istilah tersebut, maka tidak akan lepas dari feminisme. Feminisme merupakan serangkaian pemikiran yang mengakui secara eksplisit bahwa perempuan ter subordinasi oleh laki-laki dan berusaha mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah tersebut. Para ahli feminis meyakini bahwa perbedaan gender telah mempengaruhi dan mendorong ketimpangan social antara pria dan wanita. (Azizah, N., 2017)

Pada era modern dan globalisasi ini, jelas bahwa peran perempuan bukan hanya sebagai pendamping pria atau hanya mengurus rumah tangga. Kaum perempuan pada era globalisasi ini juga harus bersosialisasi dengan masyarakat dan mengembangkan

karirnya. Permasalahan yang sering dihadapi oleh perempuan yang tidak dapat dipisahkan yakni ideologi, struktur, dan budaya. Ketiga hal tersebut berkaitan dalam hal mengukuhkan suatu kondisi yang tidak menguntungkan bagi perempuan. (Djelantik, 2009)

Pemerintah Australia telah membuat komitmen untuk menjadi yang terdepan dalam upaya mempromosikan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan, khususnya di kawasan Indo-Pasifik, dan telah mengakui gender kesetaraan dan pemberdayaan perempuan sebagai bagian inti dari kebijakan luar negeri, diplomasi ekonomi dan pekerjaan bantuan dari Departemen Luar Negeri dan Perdagangan. Diluncurkan pada Februari 2016, jenis kelamin DFAT strategi berupaya untuk menjunjung tinggi reputasi internasional Australia sebagai pemimpin global dalam kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Kepemimpinan Australia di bidang ini adalah salah satu yang terbesar di negara kami 'Aset', dan memperkuat integrasi gender di seluruh kebijakan luar negeri Australia, termasuk keamanan, pengembangan, diplomasi dan perdagangan, dapat berkontribusi pada hasil yang signifikan untuk kemakmuran, perdamaian dan stabilitas. Sudah sejak awal 2017, Australia telah menyaksikan regresi besar dalam hak-hak perempuan di antara Mitra G20 Australia termasuk pengesahan undang-undang Parlemen Rusia untuk melakukan dekriminialisasi kekerasan dalam rumah tangga dan reintroduksi Global Gag Rule dari Pemerintah AS, yang mencegah LSM mempromosikan layanan aborsi dan rujukan yang aman. Voting negara konservatif terus menantang hak reproduksi melalui proses

antar pemerintah seperti Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Status Perempuan, mempertahankan tekanan terus-menerus terhadap kemajuan apa pun. Dalam konteks global yang begitu cepat berubah, di mana hak-hak perempuan terus ditolak, ini menuntut kepemimpinan yang berani untuk mempertahankan perolehan yang dimenangkan dengan susah payah dan untuk memajukan sepenuhnya dan adil partisipasi perempuan dalam semua bidang kehidupan publik, ekonomi dan sosial. Kebijakan luar negeri Australia harus mengakui bahwa perempuan diwakili secara tidak proporsional orang-orang yang hidup dalam kemiskinan dan pengucilan dan mereka yang paling terkena dampak konflik, bencana dan iklim berubah karena meluasnya ketidaksetaraan gender dalam akses ke sumber daya dan pengambilan keputusan. Namun itu juga harus mengakui bahwa dengan menempatkan pemberdayaan perempuan di garis depan internasional Australia dalam agenda hubungan, perempuan bisa menjadi agen perubahan yang aktif dan mendalam dalam memperbaiki kekuasaan dinamika yang menghasilkan gender dan bentuk-bentuk diskriminasi dan ketidakberuntungan lainnya. Ini tidak hanya akan mendorong hasil ekonomi yang lebih baik dalam jangka panjang tetapi juga memastikan kesejahteraan semua populasi dunia baik wanita maupun pria. Berdasarkan inspirasi dari pemerintah Swedia dan Norwegia, pengajuan ini membutuhkan Australia untuk mengangkat upayanya untuk memajukan kesetaraan gender dan hak-hak perempuan di panggung global berakhir 10 tahun ke depan. Secara khusus Pemerintah Australia harus memastikan kebijakan luar negerinya dengan tegas didasarkan pada visi feminis yang memajukan kesetaraan gender dengan memperkuat hak-hak perempuan, perwakilan

yang setara dan akses ke sumber daya. Negara-negara yang telah melakukan pendekatan semacam itu mengakui bahwa perspektif gender yang lebih kuat dapat meningkatkan efektivitas operasional militer, kestabilan aliansi, pencegahan konflik, terorisme dan penyakit serta berkontribusi untuk perdamaian.

Kebijakan luar negeri Australia harus didasarkan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia universal dan menjunjung tinggi kebijakan Australia kewajiban perjanjian dan komitmen internasional untuk memajukan kesetaraan gender dan hak-hak perempuan. Ini termasuk komitmen di bawah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 5 untuk mengakhiri semua bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, memastikan akses universal ke seksual dan kesehatan reproduksi dan hak-hak reproduksi, serta persamaan hak perempuan untuk sumber daya ekonomi, serta akses ke kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk properti lainnya, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam. Kebijakan luar negeri Australia harus mengakui, menegaskan dan sumber daya kewajiban kami berdasarkan Konvensi PBB tentang Penghapusan segala bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (1979) dan Protokol Opsionalnya (1999), Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948), Perjanjian Internasional tentang Hak Sosial, Ekonomi dan Budaya & Hak Sipil dan Politik (1966), Program Aksi Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan (1994) dan Platform Beijing untuk Aksi (1990), 2030 Agenda untuk Pembangunan Berkelanjutan (2015), Konvensi Bersatu tentang Hak-Hak Penyandang

Disabilitas dan Protokol Opsionalnya (2007), Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (2007)

Beberapa upaya sudah dilakukan Australia untuk menunjukkan jatui diri mereka bahwa mereka merupakan negara yang peduli dengan kesetaraan gender dalam beberapa tahun terakhir. Dalam politik dalam negeri, Australia telah membuktikan bahwa mereka merupakan negara yang menghormati hak asasi manusia tanpa membedakan gender. Buktinya adalah terpilihnya Julia Gillard pada tahun 2010 sebagai perdana menteri wanita pertama Australia. Lalu, diangkatnya Julie Bishop menjadi menteri luar negeri, dan diangkatnya Marise Payne menjadi menteri luar negeri Australia pada tahun 2018, yang sekarang dia juga menjabat menjadi menteri untuk wanita pada tahun 2019.

Pada tahun 2013 terjadi kemitraan antara Pemerintah Australia dengan Indonesia yaitu tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, atau biasa disebut MAMPU. Selanjutnya Australia kembali mengadakan kerjasama atau kemitraan dengan Indonesia tentang Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) pada tahun 2015, atau lebih tepatnya jangkauan sampai tahun 2019 dengan mengimplementasikan Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial (GESI). Lalu, Menyambut Hari Perempuan Internasional (International Women's Day) yang akan jatuh pada 8 Maret 2016, Duta Besar Australia Paul Grigson meluncurkan strategi baru Australia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Jakarta. Strategi ini merupakan rencana komprehensif yang disusun untuk mendorong

kemajuan terkait kesetaraan gender dalam kebijakan politik luar negeri dan kerjasama pembangunan Australia. Tiga bidang utama yang menjadi perhatian dalam rencana ini adalah: mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, pemberdayaan ekonomi perempuan, dan partisipasi perempuan dalam kepemimpinan dan pembangunan perdamaian. Pemerintah Australia juga menekankan pentingnya kemitraan antara negaranya dengan negara lain contoh sala satunya yaitu Indonesia dalam pembentukan komitmen tentang kesetaraan gender di kedua negara. Kemitraan tersebut terjalin melalui program-program seperti Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan (MAMPU) dan inisiatif *Investing in Women*. Selanjutnya, pada tahun 2019 ini Pemerintah Australia bekerjasama dengan Vietnam guna mempromosikan pemberdayaan perempuan dalam layanan asing di era digital. Forum ini diselenggarakan agar menciptakan peluang yang sangat baik bagi kedua negara untuk meningkatkan kerja sama dan memperkuat persahabatan antara para diplomat, terutama diplomat perempuan untuk menjalankan peran manajerial. (Robyn Mudie,2019) . Selanjutnya, Australia membantu Papua Nugini untuk mengatasi kekerasan berbasis gender dengan mendukung peningkatan pemberian layanan, jalur pencegahan, koalisi advokasi dan jalur rujukan. pada 2017-2018, data dari *Pacific Womens Shaping Pacific Development* memungkinkan lebih dari 19.000 perempuan dan anak perempuan untuk mengakses dukungan, termasuk konseling, layanan kesehatan dan keadilan, termasuk untuk kasus terkait tuduhan sihir. (Australian Government, 2018)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut : **“Mengapa kebijakan kesetaraan gender mempengaruhi politik luar negeri Australia 2018-2019 ?”**

C. Kerangka Berfikir

1. Teori Konstruktivis

Konstruktivisme merupakan salah satu tradisi pemikiran yang sangat berpengaruh dalam studi hubungan internasional saat ini. Berdasarkan Teori dari Alexander Wendt tentang Konstruktivisme, merupakan teori yang muncul ditengah dari teori-teori yang digolongkan ke dalam aliran materialisme-rasionalisme seperti realisme, neorealisme, neoliberalisme, liberalisme / pluralisme, Marxisme dengan teori-teori seperti teori kritis, feminisme dan postmodernisme. Konstruktivis muncul sebagai suatu pendekatan yang penting di dalam hubungan internasional karena posisi ontologisnya yang secara nyata berbeda dari pendekatan-pendekatan rasionalis yang lebih dulu ada dan sangat dominan. Konstruktivis muncul memberikan alternatif lain di dalam melihat hubungan internasional yang selama ini didominasi oleh pemahaman materialis-rasionalis yang berbasiskan pada materi. Sebaliknya, konstruktivis dibangun dari basis ide, norma, budaya, dan nilai. Atas dasar itulah konstruktivis digolongkan ke dalam teori idealis. Formulasi teoritik konstruktivis menyatakan bahwa lingkungan sosial menentukan bentuk identitas aktor. (Alexander Wendt,1999)

Dari contoh kasus diatas, bisa danalisis konstruktivisme yang dibangun Australia terhadap kesetaraan gender bagi politik luar negerinya, yang menghasilkan nilai penting :

Australia tidak mendefinisikan identitas nasionalnya berdasarkan ras atau agama, tetapi berdasarkan nilai-nilai bersama, termasuk kebebasan politik, ekonomi, dan agama, demokrasi liberal, supremasi hukum, kesetaraan ras dan gender dan saling menghormati. Kesetaraan gender adalah salah satu nilai Negara Australia yang memengaruhi kebijakan luar negeri dan kerja sama pembangunannya

Berdasarkan konstruksi yang dibangun oleh Australia, Australia akan terus mendorong kesetaraan gender demi kepentingan politik luar negerinya. Dengan mengadakan perundingan, kemitraan, dan kerjasama dengan negara lain. Dengan mengadakan kemitraan dan kerjasama, maka Australia bisa terus eksis atau dipandang bawa mereka merupakan negara yang feminis atau peduli dengan kesetaraan gender. Kesetaraan gender adalah hak penting dan pendorong kuat untuk pertumbuhan, pengembangan dan stabilitas. Mempromosikan kesetaraan gender adalah bagian integral untuk memajukan kepentingan nasional Australia dan mencerminkan nilai-nilai keadilan Australia dan kesetaraan substantif.

Australia tidak main-main dengan keseriusan mereka di dalam bidang kesetaraan gender. Buktinya mereka sampai mendirikan Duta Kesetaraan Gender atau lebih tepatnya Duta Besar Australia untuk Perempuan dan Anak Perempuan yang didirikan pada tahun 2011. Pada saat itu Duta pertamanya adalah Penny William. Dengan mendirikan Duta Kesetaraan Gender ini, mereka menegaskan bahwa mereka ingin

menjadikan identitas Negara mereka adalah Negara yang mempromosikan kesetaraan gender di arena internasional dan memberi perempuan suara yang lebih kuat di dunia.

Pemerintah Australia telah membuat komitmen untuk menjadi yang terdepan dalam upaya mempromosikan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan, khususnya di kawasan Indo-Pasifik, dan telah mengakui gender kesetaraan dan pemberdayaan perempuan sebagai bagian inti dari kebijakan luar negeri, diplomasi ekonomi dan pekerjaan bantuan dari Departemen Luar Negeri dan Perdagangan. (ActionAid Australia, 2017)

Penerapan pendekatan konstruktivis dapat dilihat dengan mengadopsi ide wendt tentang konsep identitas. Konstruktivis tidak menganggap kepentingan sebagai sesuatu yang otomatis dilakukan oleh negara, tetapi kepentingan dapat dikatakan merupakan fungsi identitas suatu negara. Berbeda dengan identitas di kalangan realis dimana negara selalu mempunyai kepentingan sendiri mencari keamanan, identitas dalam kacamata konstruktivis tidaklah dengan sendirinya dilekatkan pada negara tetapi ia terbentuk secara sosial (dalam proses sosial) dan historically contingent (bergantung pada kondisi).

Identitas Australia juga merupakan negara dengan banyak latar belakang yang berkaitan dengan feminis dan bidang perempuan baik dalam lingkup politik atau bidang lainnya. Di sisi lain, Australia merupakan negara yang sangat terbuka terhadap apapun yang Australia lakukan, apapun yang berkaitan dengan politik luar negeri, mereka akan paparkan secara transparan. Jadi, sangat mudah jika nyatanya dalam

mengajukan kemitraan dalam bidang perempuan Australia akan mendapatkan respon positif dari Negara lain.

2. Teori Proses Pengambilan Kebijakan Luar Negeri (*Foreign Policy Decision Making Process*)

Hal pertama yang perlu diketahui untuk menjawab pokok permasalahan dan menganalisis menggunakan teori proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri, penting untuk memahami konsep dasar kebijakan luar negeri. George Modelski, mendefinisikannya sebagai “sistem kegiatan yang dikembangkan oleh masyarakat untuk mengubah perilaku negara lain dan untuk menyesuaikan kegiatan mereka sendiri dengan lingkungan internasional. Kebijakan luar negeri harus menyoroti cara negara berusaha untuk berubah, dan berhasil mengubah perilaku negara lain. ”Modelski, hanya mencatat aspek-aspek kebijakan yang mengarah pada perubahan perilaku negara yang ada, sebagai tujuan utama kebijakan luar negeri. Namun, kebijakan luar negeri tidak hanya berubah, tetapi juga kelanjutan dari perilaku pada waktu yang berbeda. (Neack, 2008) Kebijakan luar negeri telah didefinisikan dalam berbagai cara oleh para sarjana. Namun, mereka yakin bahwa itu berkaitan dengan perilaku negara terhadap negara lain. Charless Hermann mendefinisikan kebijakan luar negeri sebagai “tindakan sengaja yang berbeda yang dihasilkan dari keputusan tingkat politik individu atau kelompok individu. Hal ini dapat diamati dari keputusan tingkat politik. Ini bukan keputusan, tetapi produk dari keputusan.” Dengan ini, dapat dilihat bahwa Hermann

mendefinisikan kebijakan luar negeri sebagai perilaku negara. (AS, 2018). Karena kebijakan luar negeri secara umum adalah tentang interaksi suatu negara dengan negara lain, interaksi ini hanya terjadi di tingkat 'internasional' dan karenanya, tidak dapat diabaikan dalam menganalisis kebijakan luar negeri negara mana pun.

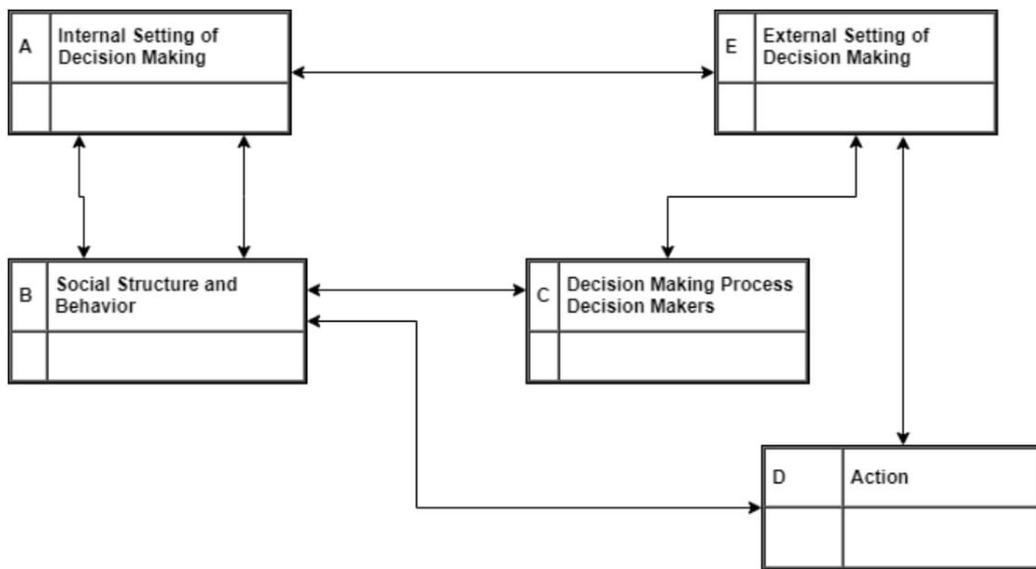
Kebijakan luar negeri setiap negara dipengaruhi oleh dua faktor penentu; 'Internasional' / eksternal dan 'domestik' / internal. ini dianggap sebagai faktor yang membantu dalam membentuk dan membentuk kebijakan luar negeri suatu negara. Dalam kasus ini, harus ada faktor internal yang mempengaruhi Australia di final untuk mengambil keputusan. Di sisi lain, proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri harus dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti internal dan eksternal. Untuk menganalisisnya, Richard C. Snyder, H. W. Bruck, dan Burton Sapin telah menjelaskan secara khusus proses di belakang negara memutuskan untuk membuat kebijakan luar negeri dengan menggunakan perspektif faktor internal dan eksternal.

Faktor eksternal merupakan faktor atau kondisi yang berada di luar batas teritorial negara - tindakan dan reaksi negara lain (pembuat keputusan mereka) dan masyarakat tempat tindakan dan dunia fisik berlangsung. Perlu dicatat bahwa faktor ini tidak mengecualikan apa yang disebut keterbatasan lingkungan seperti keadaan teknologi, rasio morbiditas dan sebagainya. Pengaturan eksternal terus berubah dan akan terdiri dari apa yang para pembuat keputusan memutuskan adalah penting. Biasanya faktor dan kondisi yang disebut dengan istilah faktor internal secara longgar diberi label "politik dalam negeri," "opini publik" atau "posisi geografis". Pengertian yang agak lebih memadai yakni beberapa petunjuk tentang cara negara berperilaku

terhadap dunia harus dicari dalam cara masyarakatnya diatur dan berfungsi, dalam karakter dan perilaku rakyatnya dan di tempat tinggal fisiknya. (Snyder, Sapin, & Bruck, 2002)

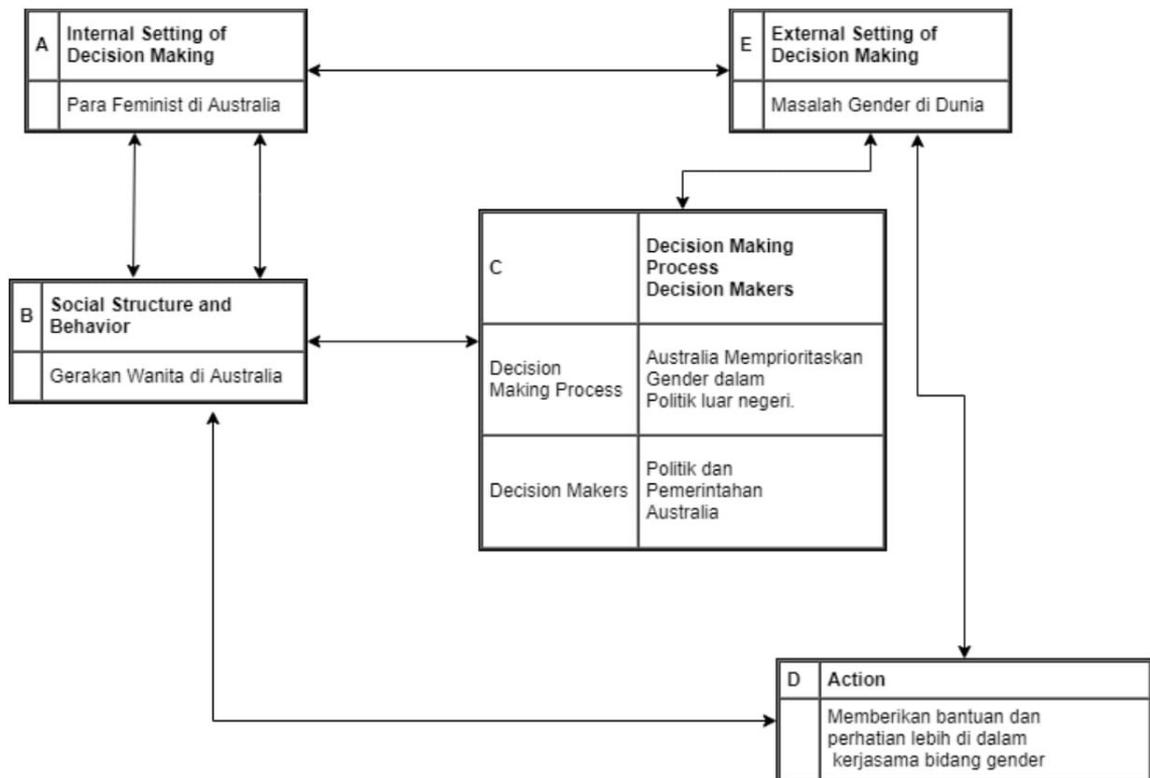
Gambar 1.1 Model Proses Pengambilan Keputusan Politik Luar

Negeri Richard Snyder (Snyder & Sapin, 1962)



Untuk menjelaskan kasus ini, diagram di bawah ini akan menjelaskan berdasarkan aplikasi.

Gambar 1.2 Aplikasi Decision Making Process



Australia memasukan gender dalam ruang lingkup politik luar negerinya karena berhasrat ingin menjadi pemimpin dalam kesetaraan gender. Hal itu dipengaruhi juga dari faktor internal dan eksternal. Isu gender ini juga merupakan isu yang hangat dibicarakan di dunia. Karena juga saat ini mayoritas penduduk wanita di dunia menginginkan kesetaraan, baik dalam lingkup politik sampai aspek pekerjaan sekalipun.

Dari faktor internal, para feminis di Australia terus menunjukkan eksistensinya. Lebih tepatnya di dalam pemerintahan Australia sekarang sudah ada bukti yang kuat.

Contohnya adalah dibentuknya Australia's Ambassador for Woman and Girls, serta banyaknya organisasi yang bergerak di bidang wanita, salah satunya adalah WFA atau Woman's Forum Australia. Mayoritas memang gerakan wanita sangat mempengaruhi kesetaraan gender di Australia.

D. Hipotesa

Australia memberikan prioritas tentang kesetaraan gender dalam bantuan pembangunan karena dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal :

1. Faktor internal yakni kuatnya gerakan wanita di Australia yang mengkonstruktivis pentingnya kesetaraan gender yang mempengaruhi politik luar negeri.
2. Faktor eksternal yakni ketimpangan gender dunia masih tinggi.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sejarah gerakan kesetaraan gender di Australia.
2. Untuk memahami pengaruh kesetaraan gender di Australia.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan alasan dibalik Australia menjadikan kesetaraan gender menjadi prioritas utama di Politik Luar Negeri mereka.
4. Untuk mengetahui dan mengevaluasi masalah-masalah yang dihadapi Australia dalam memprioritaskan kesetaraan gender baik di Politik Dalam Negeri maupun Politik Luar Negeri.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam tesis ini adalah analisis kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan (deskripsi) mengenai proses keputusan suatu negara dalam membentuk kerjasama bantuan dengan studi kasus tentang Pengaruh Kesetaraan Gender Terhadap Politik Luar Negeri Australia 2018-2019.

Teknik pengumpulan data menggunakan sumber primer dan sekunder. Penelitian ini didasarkan pada literatur akademik, laporan resmi pemerintah, jurnal, laporan berita yang kredibel, artikel, dan data elektronik lainnya yang relevan. Teknik pengolahan data dimulai dengan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan Pengaruh Kesetaraan Gender Terhadap Politik Luar Negeri Australia 2018-2019. Teknik analisis data penelitian ini yakni menghubungkan-hubungkan dengan sumber lain yang lebih dekat dengan objek. Mencari sumber yang memiliki banyak referensi sehingga fakta yang akan dihasilkan lebih terpercaya dan dengan memastikan apakah data yang dimasukkan memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Teknik ini secara umum berguna untuk mengurangi tingkat kesalahan input data dalam penelitian ini. Selain itu juga menggunakan teknik reduksi data dengan membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan adalah teknik induktif dimana proses pengambilan kesimpulan (atau pembentukan hipotesis) yang didasarkan pada

bukti fakta yang ada. Proses pembentukan hipotesis dan pengambilan kesimpulan berdasarkan data yang diobservasi dan dikumpulkan terlebih dahulu dengan kesimpulan menjelaskan fakta sedangkan faktanya mendukung kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun skripsi ini akan menggunakan sistem penulisan itu terdiri dari lima bab untuk menjelaskan hasil penelitian skripsi, yaitu:

BAB I adalah bab awal yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, kerangka berpikir, hipotesis, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II adalah bab yang akan membahas tentang sejarah dan dinamika gerakan kesetaraan gender di Australia.

BAB III adalah bab yang akan membahas tentang bantuan pembangunan Australia tentang kesetaraan gender di Papua Nugini, Indonesia, dan Myanmar tahun 2018-2019.

BAB IV adalah bab yang akan membahas tentang faktor-faktor Australia memprioritaskan kesetaraan gender bagi Politik Luar Negeri Australia.

BAB V adalah bab tentang kesimpulan dari penjelasan dalam bab-bab sebelumnya dan kesimpulan yang ditarik diharapkan dapat menjawab penelitian pertanyaan.